

**KEBIJAKAN PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN INDONESIA
DALAM MENGAHADAPI KRISIS PANGAN DUNIA TAHUN 2008**

Cridha Yulihastin

Dosen pembimbing : Pazli, S.IP, M.Si

Email : cridhayulihastin@rocketmail.com

CP : 082389351848

Abstract

This research describes the policy of agriculture survive of Indonesia for crisis agriculture in the world. This crisis start began in 2005 when the price of rice and climate chance happened in the world. From 1990 agriculture and food have been a scarcity and so many country was make a policy to anticipation that crisis.

The writer collects data from books, encyclopedia, journal, mass media and websites to analyze the policy of agriculture survive of Indonesia for crisis agriculture in the world. The theories use neo liberalisme perspective and applied in this research are foreign policy theory from K.J Holsti and national interest concept from Donald E Nuchterlain.

The research shows that the policy of agriculture survive of Indonesia for crisis agriculture in the world are the policy of price rice, support institutionalisme agriculture, pressure the import rice, the policy of price non agriculture and diversivication agriculture from the crisis agriculture in the world.

Key words: *Agriculture, Crisis, Policy and national interest.*

Pendahuluan

Penelitian ini merupakan sebuah kajian ekonomi politik internasional yang menganalisis mengenai kebijakan ketahanan pangan Indonesia dalam menghadapi krisis pangan dunia tahun 2008. Secara khusus penelitian ini difokuskan pada hal-hal yang dilakukan oleh Indonesia dalam menghadapi krisis pangan dunia tahun 2000 sampai dengan 2007.

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Pada metode ini, data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas merupakan data-data sekunder yang didapatkan dari buku-buku., majalah-majalah, jurnal, surat kabar, bulletin, laporan tahunan dan sumber-sumber lainnya. Peneliti juga menggunakan sarana internet dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

Dalam rangka memberikan fokus yang lebih tajam terhadap permasalahan yang dibahas, maka peneliti merasa perlu untuk memberikan batasan waktu dalam penelitian ini. Adapun rentang waktu yang akan peneliti maksud adalah antara tahun 2000-2008 pada masa krisis pangan dunia internasional. Tahun 2000 dipilih karena pada saat itu merupakan awal terjadinya krisis pangan di dunia internasional yang berlangsung sampai tahun 2007 sebanyak 5 kali krisis pangan. Namun begitu batasan tahun pada penelitian ini bukan merupakan suatu hal yang mutlak, tahun-tahun sebelum dan sesudahnya juga akan menjadi bagian dari kajian penelitian ini.

Kerangka dasar pemikiran diperlukan oleh penulis untuk membantu dalam menetapkan tujuan dan arah sebuah penelitian serta memiliki konsep yang tepat untuk pembentukan hipotesa. Teori bukan merupakan pengetahuan yang sudah pasti tapi merupakan petunjuk membuat sebuah hipotesis. Dalam melakukan penelitian ini, dibutuhkan adanya kerangka pemikiran yang menjadi pedoman peneliti dalam menemukan, menggambarkan dan menjelaskan objek penelitian sekaligus menjadi *frame* bagi peneliti.

Penulis menggunakan perspektif neo liberalisme, dimana dalam perspektif ini yang menjadi tujuan utama dari hubungan perdagangan adalah efisiensi untuk mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi dan interaksi ekonomi yang dijalankan. Perspektif ini bermanfaat untuk memahami fenomena di setiap negara atau pemerintah yang berusaha untuk meningkatkan daya saing nasional dan kekuatan ekonominya untuk mendapatkan keuntungan yang ditawarkan oleh pasar internasional atau global.¹

Untuk membangun negara bangsa yang kuat untuk memerlukan pengintegrasian politik dan ekonomi sehingga negara harus melibatkan diri secara aktif untuk mengatur ekonomi demi meningkatkan kekuasaan negara. Oleh sebab itu untuk mempertahankan perekonomiannya supaya tetap kuat maka harus melakukan

¹ Aleksius jemadu. 2007. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. Graha Ilmu. Hal 225

hubungan ekonomi melalui surplus perdagangan dengan membatasi impor dan menggalakkan ekspor sebanyak-banyaknya. Hubungan dapat disimpulkan bersifat *zero sum game* (konflik bukan bersifat harmonis). Menurut **Thomas Mun** dalam bukunya mengemukakan bahwa:

*“The ordinary means therefore to encrease our wealth and treasure is by foreign trade, wherein we must ever observe this rule: to sell more to yearly than we consume of their in value...because that that part of the stock which is not returned to us in wares must necessarily brought home ini treasure.”*²

Tingkat analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tingkat negara-bangsa, dalam hubungan internasional negara sering kali yang menjadi pembuat keputusan yang tentunya tidak bertindak sendiri-sendiri namun berperan sebagai kelompok. Hubungan internasional berdasarkan analisa ini merupakan interaksi yang membentuk pola dan pengelompokan. Peranan negara sangat penting dalam kerjasama antar negara satu dengan negara lain walaupun oknum yang bekerja dalam melakukan hubungan perdagangan atau terjadinya blok perdagangan adalah kelompok importir maupun eksportir.

Ekonomi internasional merupakan hubungan ekonomi antarnegara di dunia. Hubungan tersebut menimbulkan saling ketergantungan (*interdependence*) antara negara satu dengan negara lainnya dan merupakan esensi yang penting untuk peningkatan kesejahteraan hidup hampir semua negara di dunia, selain itu hubungan ini tidak hanya identik dengan hubungan ekonomi internasional antarnegara namun sebagian besar berhubungan dengan perdagangan internasional. Bidang ekonomi internasional seperti pertukaran jasa, komoditi, modal, teknologi informasi dan komunikasi.

Pertukaran jasa dan komoditi terjadi antara penduduk di satu negara dengan penduduk di negara lain karena adanya keperluan untuk memperoleh jasa dan komoditi atau barang guna memenuhi kebutuhan hidup yang tidak selalu dapat dihasilkan sendiri. Pertukaran teknologi dan modal terjadi dalam rangka membantu menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimilikinya untuk pengembangan industrinya. Teknologi yang dimiliki oleh suatu negara belum cukup canggih untuk mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi dan modal yang dimiliki suatu negara tidak memadai.

Donald E. Nuchterlain mengemukakan kepentingan sebagai kebutuhan yang dirasakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain yang merupakan lingkungan eksternalnya.³ Kepentingan nasional inilah yang memberikan kontribusi yang besar bagi pembentukan pandangan-pandangan keluar bagi suatu bangsa. Kepentingan nasional menurut Donald E. Nuchterlain terbagi atas empat poin, yaitu:

² Deliarov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995. Hlm 18

³ Donald E. Nucterlain. *National Interest A new Approach*, Orbis. Vol 23. No.1 (Spring). 1979, hlm 57

1. *Defense Interest*: Kepentingan untuk melindungi negara atau rakyat dari ancaman fisik dari negara lain atau perlindungan ancaman terhadap sistem suatu Negara.
2. *Economic Interest*: Kepentingan ekonomi yang berupa tambahan nilai secara ekonomi dalam hubungannya dengan negara lain dimana hubungan perdagangan yang dilakukan dengan negara lain akan memberikan keuntungan.
3. *World Order Interest*: Kepentingan tata dunia dengan adanya jaminan pemeliharaan terhadap sistem politik dan ekonomi internasional dimana suatu negara dapat merasakan keamanan sehingga rakyat dan badan usahanya dapat beroperasi diluar batas Negara dengan aman.
4. *Ideological Interest*: Kepentingan ideologi dengan perlindungan terhadap serangkaian nilai-nilai tertentu yang dapat dipercaya dan dapat dipegang masyarakat dari suatu negara yang berdaulat.⁴

Berdasarkan pendapat Donald E. Nuchterlain, maka kebijakan ketahanan pangan Indonesia dalam menghadapi krisis pangan dunia tahun 2008 adalah bentuk dari kepentingan ekonomi Indonesia untuk mengantisipasi terjadinya krisis pangan di Indonesia.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori **K.J Holsti** mengenai kebijakan luar negeri. Menurut holsti kebijakan luar negeri adalah tindakan atau gagasan yang dirancang oleh pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah atau mempromosikan suatu perubahan dalam lingkungan, yaitu dalam kebijakan sikap atau tindakan dari negara lain.

Selain itu menurutnya, kebijakan luar negeri adalah kegiatan yang sarat maksud (*purposeful activity*). Meskipun beberapa kebijakan dibuat untuk mengubah kondisi diluar negeri demi meraih kepentingan Negara pembuat kebijakan. Namun, kebanyakan dibuat demi kepentingan dalam negeri (misalnya keinginan mencari rasa aman, kesejahteraan, otonomi, gengsi). Holsti menekankan tiga hal penting dalam perumusan kebijakan luar negeri yaitu orientasi, peran dan tujuan.

Holsti mencatat tiga orientasi tujuan yang diterapkan unit politik tanpa menghiraukan, yaitu: isolasi, nonblok dan pembentukan koalisi atau aliansi. Sedangkan konsep peran holsti dibedakan dalam 16 tingkatan aktifitas. Holsti membedakan konsep tujuan kedalam tiga tingkatan yaitu jangka pendek (tujuan inti), jangka menengah dan jangka panjang. Kombinasi dari ketiga hal tersebut akan membentuk tindakan atau kebijakan luar negeri.

Jadi kebijakan ketahanan pangan Indonesia dalam menghadapi krisis pangan dunia tahun 2008 itu merupakan bentuk dari orientasi yang terjadi di dunia internasional. Dengan krisis pangan yang terjadi didunia internasional tentu saja

⁴ *Ibid.*

sangat berpengaruh bagi keberlangsungan kebutuhan pangan di Indonesia. Sehingga mengakibatkan kebijakan pangan di Indonesia harus ditingkatkan dengan terstruktur.

Hasil dan Pembahasan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan primer manusia yang merupakan kebutuhan pokok untuk manusia melanjutkan proses kehidupan. Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap manusia yang harus senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli negara-negara. Oleh karena itu ketersediaan bahan pangan haruslah menjadi prioritas utama dan berkelanjutan. Pangan terdiri atas padi, jagung, gandum, ubi dan bentuk makanan karbohidrat lainnya yang tentu saja sangat dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia akan makan.

Saat ini kebutuhan akan pangan tidak sebanding dengan pertumbuhan laju tingkat kelahiran manusia. Jika diukur dari alat ukur dan timbang, maka pertumbuhan pangan hanya sekitar 5% di dunia internasional, hal ini tidak sebanding dengan laju tingkat kelahiran manusia sekitar 15%.⁵ Perbedaan tingkat produktivitas pangan di dunia internasional dengan tingkat laju angka kelahiran manusia ini tentu saja jika tidak disiasati akan berdampak pada krisis pangan dunia.

Bank Dunia dalam Proyeksi Ekonomi Global, mengingatkan Negara-negara berkembang agar mewaspadaikan kenaikan harga pangan akibat kemungkinan gangguan iklim pada tahun 2011. Apalagi Food Agriculture Organization (FAO) dalam laporannya menyebutkan beberapa Negara akan terkena krisis pangan berat seperti Indonesia, China, dan India.⁶

Berkenaan dengan peringatan tersebut terbukti harga pangan dalam negeri khususnya beras mengalami lonjakan eksponensial sejak tahun 2010. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah antara lain dengan melakukan operasi pasar untuk menekan harga beras di pasar dalam negeri, serta akan mengimpor 1,3 juta ton beras tahun 2011, harus dilihat dalam perspektif petani karena ternyata strategi ketahanan pangan tersebut merugikan petani. Di sisi lain, perlu diantisipasi secara cerdas kebijakan dalam negeri Thailand dan Vietnam tentang pembatasan ekspor beras mereka akibat krisis pangan global tersebut. Thailand dan Vietnam adalah negara yang setia melayani kebutuhan impor beras Indonesia.

Komoditi lain seperti gula, daging dan sektor pertanian lainnya ternyata salah kelola akibat kebijakan impor besar-besaran dengan bea masuk 0 (nol) persen. Kebijakan tersebut sangat tidak visioner dan secara perlahan – lahan mematikan petani lokal karena memang harus diakui bahwa harga gula impor di pasaran misalnya lebih murah dari gula lokal.

⁵ Diakses dari <http://www.kebutuhan.pangan.dunia.com>. Pada tanggal 10 Juli 2012.

⁶ *Ibid.* Hlm 32

Namun, dalam beberapa tahun belakangan ini, masalah kecukupan pangan dunia menjadi isu penting, dan banyak kalangan yakin bahwa dunia sedang menghadapi krisis pangan sejak 2007 karena laju pertumbuhan penduduk di dunia yang tetap tinggi setiap tahun, sementara, di sisi lain, lahan yang tersedia untuk kegiatan-kegiatan pertanian terbatas, atau laju pertumbuhannya semakin kecil, atau bahkan secara absolut cenderung semakin sempit. Pandangan ini persis seperti teori Malthus yang memprediksi suatu saat dunia akan dilanda kelaparan karena defisit produksi.

Memang setidaknya sejak tahun 2000 hingga tahun 2007 dunia sudah mengalami defisit stok pangan 5 kali, yaitu tahun 2000, 2002, 2003, 2006, dan 2007. Krisis pangan kali ini menjadi krisis global terbesar abad ke-21, yang menimpa 36 negara di dunia.

Santosa mencatat bahwa akibat stok akhir yang semakin terbatas, harga dari berbagai komoditas pangan (tidak hanya beras tetapi juga pangan lainnya seperti gandum, kedelai, jagung, gula/tebu, dan minyak sawit) tahun 2008 ini akan menembus *level* yang sangat mengkhawatirkan. Harga seluruh pangan diperkirakan tahun 2008 akan meningkat sampai 75% dibandingkan tahun 2000; beberapa komoditas bahkan harganya diperkirakan akan mengalami kenaikan sampai 200%. Harga jagung akan mencapai rekor tertinggi dalam 11 tahun terakhir, kedelai dalam 35 tahun terakhir, dan gandum sepanjang sejarah.⁷

Petani adalah produsen pangan dan petani adalah juga sekaligus kelompok konsumen terbesar yang sebagian masih miskin dan membutuhkan daya beli yang cukup untuk membeli pangan. Petani harus memiliki kemampuan untuk memproduksi pangan sekaligus juga harus memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri. Disinilah perlu sekali peranan pemerintah dalam melakukan pemberdayaan petani.

Oleh karena itu Pembangunan di bidang pangan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin, karena manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata dengan tetap bersandarkan pada daya dan potensi yang berkembang di dalam negeri.⁸

Krisis pangan yang terjadi di dunia internasional ini tentu saja menjadi ancaman bagi keberlangsungan dan kebutuhan seluruh negara didunia akan kebutuhan pangan. Ironisnya hal ini juga terjadi pada negara-negara yang secara kawasan merupakan kawasan pertanian, seperti negara-negara kawasan Asia. Hampir sebagian besar negara yang terkena dampak krisis pangan ini adalah negara yang

⁷ <http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdfiles/ARTS-32.pdf>, Beras dan Kepentingan Jangka Pendek, September 2007, diakses minggu 22 April Pukul 19.30 PM

⁸ *Ibid.*

secara potensial merupakan negara yang berbasis agraris, seperti India, Cina dan Indonesia.

Krisis pangan dunia yang berdampak terhadap negara agraris seperti Indonesia ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor alam atau iklim dan faktor produksi pangan itu sendiri. Pemanasan global dan perubahan iklim telah menjadikan musim hujan khususnya di daerah pertanian menjadi tidak menentu. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di Negara – Negara agraria lainnya. Anomali cuaca ini praktis mengancam ketahanan pangan umat manusia yang jumlahnya mencapai sekitar 6 miliar orang. Penduduk dunia yang terus bertambah tanpa antisipasi serius terhadap pasokan bahan pangan dapat menyebabkan krisis pangan global. Oleh Karena itu, alternatif – alternatif kebijakan antisipatif sangatlah mutlak untuk keluar dari ancaman global tersebut⁹

Selain faktor iklim, faktor produksi yang tidak meningkat dalam negara Indonesia juga menjadi faktor pemicu terkenanya Indonesia dari krisis pangan dunia. Faktor produksi pangan ini tentu saja dipengaruhi oleh sistem finansial. Sistem finansial memiliki peran penting dalam sebuah sistem perekonomian dunia dan juga negara. Yang berfungsi dalam menyediakan mekanisme perpindahan dana dari pihak yang surplus (pihak yang mempunyai dana yang dapat dipinjamkan) kepada pihak yang defisit (pihak peminjam dana), untuk keperluan konsumsi dan investasi di bidang yang produktif dan sebagai saluran yang esensial bagi kebijaksanaan pemerintah dalam mengatur perekonomiannya.¹⁰

Dampak krisis yang dialami negara akan berbeda karena perbedaan fundamental kebijakan ekonomi yang diambil oleh negara. Namun secara global, terpuruknya perbankan di sejumlah negara yang ditandai dengan anjloknya harga saham, yang mengakibatkan krisis kepercayaan dan kepanikan investor, akan berdampak terhadap macetnya sistem pembayaran dan penyaluran kredit global sebagai oksigen untuk bernapasnya dunia bisnis, hingga akhirnya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara dan perekonomian dunia.¹¹ Krisis ekonomi ini juga lah yang berdampak pada krisis pangan di Indonesia.

Dampak dari krisis pangan ini adalah terjadinya peningkatan nilai impor beras Indonesia sejak tahun 2005-2011 kepada negara-negara seperti Thailand, Kamboja,dll. Hal ini seharusnya tidak terjadi karena secara potensi lahan, Indonesia merupakan negara yang memiliki lahan pertanian yang subur dan merupakan negara berbasis pertanian. Indonesia telah memiliki kekayaan sumber daya alam yang

⁹ Aleksius Jemadu, 2007, *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Jakarta : Graha Ilmu

¹⁰ Herman Darmawi, *Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2006, hal. 19.

¹¹ *Memahami Krisis Keuangan, Bagaimana Harus Bersikap?*,
<http://blogs.depkominfo.go.id/bip/files/2009/01/sikapi-krisis-global.pdf>. Diakses tanggal 17 April 2012

melimpah. Kekayaan ini juga meliputi bidang pertanian dan kelautan. Potensi yang dimiliki Indonesia di sektor pertanian dan perikanan memang cukup menjanjikan untuk kecukupan kebutuhan dalam negeri Indonesia.¹²

Indonesia memiliki luas wilayah pertanian sekitar 1,6 juta km² dengan hampir 80% Provinsinya yang merupakan lumbung beras dan padi. Selain itu Indonesia juga memiliki luas wilayah perairan yang mencapai 5,8 juta km² dan garis pantai sepanjang 81 ribu km serta gugusan pulau sebanyak 17.508,¹³ menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pengeksport produk pertanian dan perikanan yang cukup diminati oleh banyak negara.¹⁴ Sehingga dengan adanya potensi ini merupakan kesempatan Indonesia untuk meraih keuntungan dalam perdagangan internasional dalam menghadapi ancaman krisis pangan.

Menurut Undang – undang nomor 7 tahun 1996 tentang pangan, pengertian ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.¹⁵ Sesungguhnya ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadinya ketergantungan pangan pada pihak manapun. Inilah yang membuat petani memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan.

Infrastruktur, sarana transportasi, rekayasa genetika dan penerapan teknologi harusnya termasuk dalam cetak biru ketahanan pangan nasional Indonesia. sebab tanpa komponen – komponen tersebut maka stabilitas dan pemerataan bahan pangan tidak bisa dijamin secara ideal. Kondisi jalan – jalan desa dan lintas propinsi di daerah produsen beras/komoditi pangan lainnya berbanding terbalik dengan harapan tersebut.

Selain adanya pengadaan pangan, ketahanan pangan nasional juga berkaitan dengan distribusi pangan nasional (yakni penyediaan pangan di setiap individu). Kedua makna ini menuntut adanya kebijakan pangan secara nasional yang dipegang wewenangnya oleh pemerintah pusat (yang berfungsi steering) dan kebijakan pangan secara regional, lokal, rumah tangga, dan individu yang dipegang wewenangnya oleh pemerintah daerah otonom (kabupaten/kota, yang berfungsi rowing). Walaupun secara makro pemerintah mampu menjamin tersedianya bahan pangan, namun semua itu haruslah dinikmati oleh seluruh rakyat indonesia secara merata dan berbasis individu.

¹² Diakses dari <http://www.antaraneews,Ikan Indonesia diduga mengandung bahan berbahaya.com>. Pada tanggal 8 Desember 2010

¹³ Diakses dari arsibberita.com. *Bea Masuk Produk Perikanan Indonesia ke China Nol Persen*. February 3, 2010 at 21:55

¹⁴ Diakses dari <http://www.demografiIndonesia.html>. Pada tanggal 18 Juni 2010

¹⁵ Undang – undang nomor 7 tahun 1996 tentang pangan, pengertian ketahanan pangan

Diberbagai negara ketahanan pangan sering digunakan sebagai alat politik bagi seorang (calon) presiden untuk mendapatkan dukungan dari rakyatnya. Ketahanan pangan bertambah penting lagi terutama karena saat ini Indonesia merupakan salah satu anggota dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Artinya, di satu pihak, pemerintah harus memperhatikan kelangsungan produksi pangan di dalam negeri demi menjamin ketahanan pangan, namun, di pihak lain, Indonesia tidak bisa menghambat impor pangan dari luar.

Dalam kata lain, apabila Indonesia tidak siap, keanggotaan Indonesia di dalam WTO bisa membuat Indonesia menjadi sangat tergantung pada impor pangan, dan ini dapat mengancam ketahanan pangan di dalam negeri¹⁶ Sehingga harus terdapat berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi terjadinya krisis pangan internasional.

Menghadapi krisis pangan dunia internasional saat ini, maka pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai terobosan kebijakan yaitu mereposisi kebijakan ketahanan pangan dan infrastruktur melalui peningkatan kebijakan swasembada pangan atau beras yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat produktivitas pertanian nasional.

Kedaulatan Pangan merupakan satu-satunya solusi yang mampu mengatasi krisis pangan yang terjadi di dunia saat ini dan konsep tersebut juga dapat dijalankan oleh setiap negara jika tidak dikooptasi oleh kepentingan perusahaan-perusahaan multi nasional. Demikian antara lain disampaikan Yoon Geum Soon, dari Korean Women Peasant Association (KWPA-Asosiasi Petani Perempuan Korea), saat menjadi salah satu pembicara dalam Seminar Internasional, bertema Food Crisis: A Need for System Change di Ball Room Hotel Grand Cemara, Jakarta, Jumat (06/05).

Yoon Geum Soon memaparkan bahwa saat ini terjadi peningkatan harga gandum besar-besaran di dunia dan krisis ekonomi global dinilainya menjadi salah satu pemicunya sehingga dia tengarai lebih dari 900 juta penduduk sedang mengalami krisis pangan. Beberapa tahun terakhir, lanjutnya, peran spekulasi keuangan semakin besar dalam perdagangan pangan dunia dimana hal itu dapat dilihat dengan semakin banyaknya investor yang mengalihkan bisnisnya ke industri pertanian dan industri pertanian juga didorong oleh industri keuangan.

Sejumlah negara maju, khususnya Amerika Serikat, melalui perusahaan-perusahaan multi nasionalnya, saat ini sangat menentukan industri pangan dunia, seperti beras, gandum & komoditas lainnya. Kondisi itu tercipta setelah Bank Dunia (World Bank) & WTO (World Trade Organization) mendorong pasar yg lebih lebar

¹⁶ <http://www.tivims.net/Statistic.jsp?lang=En&Page=Overview>. Fivims: Food Security and Vulnerability Information and Mapping system (Online)

kepada spekulasi pasar dan keuangan untuk “bermain” di dalamnya, begitu juga peran pemerintah di banyak negara.¹⁷

Henry Saragih, Koordinator Umum Gerakan Petani Internasional ‘La Via Campesina’ menyatakan bahwa krisis harga pangan yang terjadi sekarang ini sebagai akibat dari diterapkannya sistem neoliberalisme melalui World Trade Organization (WTO) dan Free Trade Agreement. Akibat dari neoliberalisme pertanian dan perdagangan komoditas pangan, jelasnya, saat ini pertanian terkonsentrasi pada pertanian yang berorientasi ekspor dan pertanian atau perkebunan dengan sistem monokultur. Mi Kyung Ryu mengatakan, karena sudah begitu mengkhawatirkan, saat ini krisis pangan bukan lagi hanya menjadi isu gerakan petani tapi juga sudah menjadi isu gerakan serikat buruh di Korea Selatan.

Adapun kebijakan Indonesia pada masa sebelum terjadinya krisis pangan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Ketahanan Pangan Indonesia

Kedaulatan Pangan merupakan satu-satunya solusi yang mampu mengatasi krisis pangan yang terjadi di dunia saat ini dan konsep tersebut juga dapat dijalankan oleh setiap negara jika tidak dikooptasi oleh kepentingan perusahaan-perusahaan multi nasional.¹⁸ Selain kedaulatan pangan, dalam level nasional kerjasama internasional lebih difokuskan pada reformasi kebijakan serta penciptaan lingkungan yang kondusif terhadap program penanganan pangan dan kelaparan.

Kebijakan strategis untuk menghadapi itu adalah penganekaragaman pangan baik konsumsi maupun produksi, ketergantungan pada beras harus dikurangi dan keunggulan komparatif komoditi pertanian yang lain harus dieksploitir. Peralihan orientasi kebijakan ini dapat mengurangi dampak fluktuasi produksi beras dan membantu pengembangan ekspor non migas. Hal ini tidak mengesampingkan kenyataan bahwa keanekaragaman pangan telah dicanangkan sejak 1970-an tetapi hasilnya belum nampak nyata sampai saat ini.

Untuk mendukung program-program diversifikasi program penelitian dan pengembangan tanaman pangan terutama untuk jagung perlu untuk diintensifkan. Program-program penelitian ini bisa menurunkan biaya produksi usaha tani sehingga tingkat keuntungan usaha tani jagung dan kedelai akan seimbang dengan usaha tani padi. Karena lahan subur di Jawa sangat terbatas, alokasi lahan untuk penggunaan yang lebih produktif sangat penting. Peralihan dari tanaman tebu ke padi pada lahan-

¹⁷ <http://www.spi.or.id/?p=3623>. Krisis Pangan sebabkan naiknya harga beras dunia. Pada tanggal 22 Januari 2012

¹⁸ [http://www.kompasiana.com/Kedaulatan Pangan Satu-satunya Solusi Atasi Krisis Pangan](http://www.kompasiana.com/Kedaulatan-Pangan-Satu-satunya-Solusi-Atasi-Krisis-Pangan) Thursday, 18 August 2011 13:59 Serikat petani Indonesia

lahan yang beririgasi baik tidak hanya akan meningkatkan produksi beras, namun juga akan meningkatkan pendapatan petani.

Pengelolaan ketahanan pangan dunia pada dasarnya menyangkut tiga hal pokok. Yaitu pertama, kearifan dalam pengelolaan (SDA), karena dimanapun pangan dihasilkan di muka bumi ini tidak dapat dilakukan tanpa SDA terutama air, baik menyangkut kebutuhan masa kini maupun masa yang akan mendatang; kedua, kepandaian dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menghasilkan dan memanfaatkan pangan bagi kehidupan manusia yang sehat dan berkecukupan; ketiga, ketepatan pengelolaan pasar, dengan pasar yang efisien pertukaran dan penyebaran pangan lebih merata. Namun realitas ketidakmerataan pengetahuan, hambatan alam dan geografis membuat pasar tak berdaya, oleh karena itu pasar juga bukan segalanya.

Tantangan utama yang dihadapi dalam pembangunan industri pangan adalah belum dapat dipenuhinya pasokan bahan baku yang kontinu dan konsisten, baik kuantitas maupun kualitasnya. Selain itu adanya ketergantungan produsen dan eksportir terhadap jaringan multinasional dalam distribusi dan pemasaran berakibat lemahnya produsen dan eksportir tersebut.¹⁹

2. Kebijakan Harga Beras

Kebijakan harga merupakan instrument pokok dalam pengadaan bahan pangan. Sasarannya pertama, melindungi konsumen dari kemerosotan harga pasar yang biasa terjadi pada musim panen. Kedua, melindungi konsumen dari kenaikan harga yang melebihi daya beli, khususnya pada musim paceklik. Ketiga, mengendalikan inflasi melalui stabilisasi harga. Kebijakan harga memiliki dua sisi yang menunjang bidang produksi dan sisi lain dapat mendorong bidang distribusi dan konsumsi. Dasar kebijakan harga antara lain, diajukan oleh Mears dan Afif (1969).

3. Pembenahan Kelembagaan Pertanian

Dalam melaksanakan kebijakan pangan yang dapat menunjang pelestarian swasembada pangan, aspek yang tidak kalah pentingnya adalah pembenahan kelembagaan pangan, baik ditinjau dari lingkup tugas maupun sasaran serta lokasinya. Hal ini di karenakan kelembagaan merupakan unsure penting bagi kemajuan Negara-negara berkembang di asia yang bercirikan padatnya penduduk. Sejak awal, pembangunan nasional khususnya dalam mencapai swasembada beras, pemerintah telah mengembangkan kelembagaan yang dapat menjadi wadah penggerak peranan dan tanggung jawab petani, seperti kelompok tani dan koperasi.

Pengembangan dan pembenahan lembaga kelompok tani dimaksudkan untuk lebih mengintensifkan penyuluhan pertanian guna meningkatkan produksi yang dapat melestarikan swasembada pangan. Dalam hal ini penyuluhan pertanian lapangan (PPL) akan sangat diharapkan sekaligus melakukan bimbingan dalam pelaksanaan

¹⁹ Mears dan Afif. 1969. An Operational Rice Price Policy in Indonesia. Ekonomi Keuangan Indonesia. Jakarta. Hlm 201

program tersebut seperti insus dan supra insus. Faktor penunjang dalam pelaksanaan program tersebut juga disediakan oleh pemerintah, sarana produksi dan jaminan pemasaran.

4. Kebijakan Diversifikasi Pangan

Kebijakan diversifikasi pangan dan perbaikan menu makanan rakyat, dalam rangka memperbaiki mutu gizi masyarakat sudah diperbaiki sejak 1974 dan disempurnakan dengan Inpres 20/1979. Namun secara operasional, diversifikasi pangan belum dapat terlaksana dengan efektif.

Widyakarya Pangan dan Gizi tahun 1988 menyebutkan tentang dua pengertian diversifikasi pangan. Pertama, diversifikasi pangan dalam rangka dalam pemantapan swasembada beras. Hal ini dimaksudkan agar laju peningkatan konsumsi beras dapat dikendalikan, setidaknya seimbang dengan kemampuan laju peningkatan produksi beras. Kedua, diversifikasi pangan dalam rangka memperbaiki mutu gizi makanan penduduk sehari-hari agar lebih beragam dan seimbang.

Arahan dalam kebijakan diversifikasi pangan mempunyai beberapa aspek yang memerlukan pengkajian lebih lanjut. Selain aspek produksi dan konsumsi, diversifikasi pangan dapat pula bersifat regional dan nasional. Diversifikasi pangan tidak dimaksudkan untuk menggantikan beras, tetapi mengubah pola konsumsi masyarakat sehingga masyarakat akan mengkonsumsi lebih banyak jenis pangan dan lebih baik gizinya. Dengan menambah jenis pangan dalam pola konsumsi diharapkan konsumsi beras akan menurun.

Hal lain yang perlu untuk diperhatikan adalah menyangkut pembangunan industri pengolahan transformasi bahan pangan non beras tidak siap untuk dikonsumsi secara langsung. Seperti jagung harus diolah terlebih dahulu untuk dijadikan beras jagung, begitu pula ubi kayu perlu pengolahan untuk dijadikan gaplek dan selanjutnya dijadikan "tiwul" atau dijadikan tepung terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Hal tersebut berbeda dengan beras yang bisa langsung dikonsumsi setelah dimasak.

Program diversifikasi ini telah mengubah peranan komoditas pangan non beras terhadap perekonomian nasional dalam dua sisi, yaitu sisi produksi dan konsumsi. Perubahan penawaran dan permintaan tanaman pangan non beras ini merupakan unsur-unsur yang harus dipertimbangkan kedalam pembuatan kebijakan program diversifikasi pertanian berdasarkan pada pandangan dua sisi: produksi dan konsumsi yaitu (i) implikasi terhadap diversifikasi produksi tanaman pangan, dan (ii) implikasi terhadap diversifikasi konsumsi tanaman pangan.

5. Kebijakan Menekan Impor

Rosegrant dkk (1987) telah menunjukkan bahwa produksi padi dan jagung di Indonesia dengan tujuan untuk mensubstitusi impor adalah cukup efisien berdasarkan konsep *comperative-advantage* namun untuk tujuan ekspor tidak demikian.

Sedangkan untuk komoditas kedelai tidak punya keunggulan komperatif baik itu untuk substitusi impor maupun promosi ekspor.

Untuk komoditas kedelai, masih tingginya biaya produksi dalam negeri dan rendahnya produktivitas menyebabkan dalam jangka pendek sulit bersaing dengan kedelai impor. Manfaat yang dapat diperoleh dengan mengimpor sebagian kebutuhan dalam negeri masih jauh lebih besar disbanding dengan melakukan swsembada kedelai. Diperkirakan pada 1990 dengan liberalisasi total untuk pedagang kedelai. Maka petani di Indonesia berkurang pendapatannya sebesar Rp 191 milyar, sehingga manfaat bersih yang dapat diterima oleh masyarakat adalah sebesar Rp 62 milyar rupiah. Kalaupun dikenakan tariff impor sebesar 20% maka masyarakat masih menerima sekitar 20-30% kebutuhan dalam negeri saja yang diimpor agar tetap dapat merangsang petani untuk meningkatkan produktivitasnya.

Beberapa kebijakan diatas merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebelum terjadinya krisis pangan, namun sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2007, pemerintah Indonesia mengubah haluan kebijakan menghadapi krisis pangan dunia, yaitu dengan membuat kebijakan pangan jangka pendek dan jangka panjang. Kebijakan jangka pendek pemerintah Indonesia menghadapi krisis pangan dunia adalah dengan meningkatkan impor pangan untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Sedangkan kebijakan jangka panjang pemerintah Indonesia menghadapi krisis pangan dunia adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan reposisi mekanisasi pertanian dan pangan
2. Kebijakan stabilitas harga pangan
3. Kebijakan penggunaan teknologi pertanian
4. Pembinaan kelembagaan pertanian

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa bahwa krisis pangan pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 menyebabkan ketidakseimbangan harga di beberapa negara termasuk pada negara agraris, seperti Indonesia, India dan Cina.

Krisis pangan ini sebenarnya telah terjadi sejak tahun 2005 namun baru menjadi permasalahan besar pada tahun 2008 ini. Secara mendasar, krisis ini dipicu oleh semakin meningkatnya jumlah penduduk dunia yang tidak didukung oleh peningkatan produksi pertanian. Selain faktor dasar tersebut, kelangkaan pangan juga diakibatkan oleh baralihnya lahan pertanian menjadi lahan industri, atau berubahnya areal persawahan padi dan gandum menjadi lahan jagung, kedelai dan berbagai macam tanaman biji-bijian yang ditingkatkan produksinya untuk memenuhi konversi kelangkaan bahan bakar fosil menjadi bahan bakar nabati.

Laporan FAO menyebutkan bahwa diperkirakan sekitar 36 negara mengalami peningkatan harga pangan yang cukup tajam yang berkisar dari 75% sampai 200%. Dalam tiga tahun terakhir secara umum, harga pangan dunia telah meningkat dua kali lipat dan disusul dengan peningkatan jumlah penduduk miskin yang tidak mampu mengakses bahan pangan. Kekhawatiran finalnya adalah adanya gejolak sosial dan politik bagi negara-negara yang mengalami krisis pangan tersebut seperti yang terjadi di Somalia pada awal Mei 2008.

Selain itu, Laporan dari The International Food Policy Research Institute menunjukkan bahwa produksi dan konsumsi pangan regional dan internasional selama dua puluh tahun terakhir dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pertumbuhan ekonomi dan kebijakan ekonomi, pertumbuhan populasi dan urbanisasi, infrastruktur di pedesaan, teknologi produksi pertanian dan akses untuk mendapatkan teknologi tersebut serta manajemen penggunaan sumber daya alam dan pertimbangan ekologi lingkungan.

Menghadapi krisis pangan dunia tersebut, maka terdapat beberapa langkah yang telah ditempuh oleh Pemerintah Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan distribusi beras
2. Kebijakan Pengadaan beras
3. Instrumen Pengadaan dan tata niaga distribusi
4. Kebijakan harga beras dan pangan non beras
5. Pembentukan kelembagaan pemerintah dan pertanian
6. Kebijakan diversifikasi pangan
7. Kebijakan penekanan impor beras dan pangan non beras.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aleksius jemadu. 2007. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. Graha Ilmu.
- Deliarnov, 1995. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
- Donald E. Nucterlain. 1979. *National Interest A new Approach*, Orbis. Vol 23. No.1 (Spring).
- Herman Darmawi, 2006. *Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial*, Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Mears dan Afif. 1969. *An Operational Rice Price Policy in Indonesia*. Ekonomi Keuangan Indonesia. Jakarta.

Website

- Memahami Krisis Keuangan, Bagaimana Harus Bersikap?*,
<http://blogs.depkominfo.go.id/bip/files/2009/01/sikapi-krisis-global.pdf>. Diakses tanggal 17 April 2012
- Diakses dari <http://www.antaranews.com>, *Ikan Indonesia diduga mengandung bahan berbahaya*. Pada tanggal 8 Desember 2010
- Diakses dari arsibberita.com. *Bea Masuk Produk Perikanan Indonesia ke China Nol Persen*. February 3, 2010 at 21:55
- Diakses dari <http://www.demografiIndonesia.html>. Pada tanggal 18 Juni 2010
- Undang – undang nomor 7 tahun 1996 tentang pangan, pengertian ketahanan pangan
<http://www.tivims.net/Statistic.aspx?lang=En&Page=Overview>. Fivims: Food Security and Vulnerability Information and Mapping system (Online)
- <http://www.spi.or.id/?p=3623>. Krisis Pangan sebabkan naiknya harga beras dunia. Pada tanggal 22 Januari 2012
- <http://www.kompasiana.com>. *Kedaulatan Pangan Satu-satunya Solusi Atasi Krisis Pangan* Thursday, 18 August 2011 13:59 Serikat petani Indonesia
- Diakses dari <http://www.kebutuhanpangan dunia.com>. Pada tanggal 10 Juli 2012.
- <http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdfiles/ARTS-32.pdf>, *Beras dan Kepentingan Jangka Pendek*, September 2007, diakses minggu 22 April Pukul 19.30 PM